

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pesantren merupakan suatu lembaga pendidikan yang telah terbukti berperan penting dalam melakukan transmisi ilmu keagamaan di masyarakat. Jumlah pesantren di Indonesia pada tahun 2022-2023 terdapat 39.043 pesantren. Sebanyak 32% merupakan pesantren salafiyah (jalur luar persekolahan yang hanya memfokuskan pada bentuk pengkajian kitab dengan metode tradisional, *halaqah*), sebanyak 23% merupakan pesantren *ashriyah-khalafiyah* (jalur sekolah), dan 45% sebagai pesantren kombinasi, yaitu pesantren yang memadukan sistem *salafiyah* dan *ashriyah-khalafiyah*. Jumlah santri seluruhnya sebanyak 4,08 juta orang, yang terdiri dari 50.4% sebagai santri mukim dan sisanya sebagai santri *kalong* (tidak menetap).¹ Dari besarnya jumlah santri ini, belum lagi alumni, tentunya tidak dapat diabaikan perannya bagi pendidikan nasional.

Perubahan pola dan sistem pendidikan di pesantren merupakan respons terhadap modernisasi pendidikan Islam dan perubahan sosial ekonomi pada masyarakat. Seperti dikemukakan Azyumardi Azra yang menyebutkan empat bentuk respons pesantren terhadap modernisasi pendidikan Islam yaitu pertama, pembaharuan substansi atau isi pendidikan pesantren dengan memasukkan subjek-subjek umum dan *vocational*. Kedua, pembaharuan metodologi, seperti sistem Klasikal dan perjenjangan. Ketiga, pembaharuan kelembagaan, seperti perubahan kepemimpinan pesantren dan diversifikasi lembaga pendidikan. Dan keempat, pembaharuan fungsi dari fungsi kependidikan untuk mencakup fungsi social ekonomi.² Diantara bentuk perubahan yang terjadi dalam sistem pendidikan di pesantren adalah penyelenggaraan pendidikan umum, madrasah regular, madrasah diniyah disamping pesantren *salafiyah* secara bersamaan, dan pelaksanaan pesantren kilat secara temporer.

¹ Direktorat Jendral kelembagaan Agama Islam Departemen Agama. *Statistik pendidikan Agama dan Keagamaan tahun 2022-2023*, <https://emispendis.kemenag.go.id/pdpontrenv2/Statistik/Pp/> (diakses 28 Desember 2023)

² Azyumardi Azra, *Pendidikan Islam, Tradisi dan Modernisasi Menuju Millenium Baru* (Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 2000), 105.

Secara kultural, pesantren mencakup pengertian yang lebih luas mulai dari sistem nilai khas yang secara intrinsik melekat di dalam pola kehidupan komunitas santri, seperti kepatuhan pada ustad/kyai sebagai tokoh sentral, sikap *ikhlas* dan *tawadhu*, serta tradisi keagamaan yang diwariskan secara turun-menurun. Kyai memiliki otoritas yang sangat besar dalam kehidupan pesantren, tidak saja karena kedalaman ilmu agamanya, tetapi juga berkaitan dengan kewibawaan moralnya yang tampak dalam kesederhanaan hidup yang tidak dipengaruhi pamrih kehidupan dunia³. Meskipun, akhir-akhir ini akibat hiruk-pikuk kehidupan politik yang tidak dapat dilepaskan dari pamrih materi dan kekuasaan yang melibatkan para kyai. Karena keunikan kehidupan pesantren ini, Abdurrahman Wahid menempatkan posisi pesantren sebagai subkultur, dengan tiga elemen utama pembentukan pesantren, yaitu kepemimpinan pesantren mandiri; kitab-kitab yang menjadi rujukan umum yang berlangsung dari masa ke masa; serta sistem nilai (*value system*) yang digunakan di lingkungan pesantren. Nilai utama yang menjadi subkultur dalam kehidupan pesantren sangat dipengaruhi oleh ketentuan fiqih dan kemudian nilai-nilai akhlak yang diamalkan.⁴

Dari cabang-cabang ilmu keislaman yang diajarkan pesantren, ilmu fiqih yang paling mendapat perhatian utama. Perhatian yang lebih besar terhadap ilmu fiqih disebabkan karena syariah dan fiqih yang secara langsung mengandung kaidah-kaidah yang diperlukan bagi implementasi ajaran Islam kedalam realitas sehari-hari. Ilmu fiqih merupakan *al-ahkam al amaliyah* (aturan hukum yang diamalkan), yang berbeda dengan misalnya kajian dalam ilmu kalam yang bersifat filosofis. Fokus pada ilmu fiqih tergambar dari popularitas pemakaian kitab literature keislaman dibidang ini. Menurut Van Berg, sebanyak 44% dari kitab yang dipelajari di pesantren berhubungan dengan fiqih, sedangkan Van Bruinessen yang juga mendalami masalah ini menyebutkan bahwa dari 900 judul teks kitab kuning di pesantren, 200 jenis diantaranya membahas tentang fiqih. 130

³ Heri Gunawan, *Pendidikan Moderasi Beragama: Kajian Teoretis, Historis, dan Implementasinya pada Lembaga Pendidikan Islam*, (Bandung: ALFABETA) 132.

⁴ Abdurrahman Wahid, *Pesantren Sebagai Sub Kultur* dalam Dawan Raharjo, (ed), *Pesantren dan pembaharuan*, (Jakarta: LP3ES, 1974) 39-60.

teks diantara 200 teks yang membicarakan masalah fiqh ditulis atau diterjemahkan oleh ulama lokal dalam bentuk *syarah* atau *hasyiah*.⁵

Selanjutnya, gagasan-gagasan pembaharuan pendidikan Islam di Indonesia terjadi klimaks dengan transformasi yang dimulai dengan maraknya berdiri organisasi masyarakat (ormas) Islam. Diantaranya Al-Jamiyyah Al-khoiriyah, yang dikenal dengan Jamiat Khoer di Jakarta yang berdiri pada tanggal 17 Juli 1905, Jamiyyatul Islah wal Irsyadil Arabi (Al-Irsyad) yang berdiri di Jakarta pada tanggal 11 Agustus 1915, Muhammadiyah yang berdiri pada 18 November 1912 di Yogyakarta, NU (Nahdhotul Ulama) didirikan pada 31 Januari 1926. Begitu juga Persis (Persatuan Islam) yang diberdiri pada tanggal 12 September 1923 di Bandung. Setiap ormas mengambil peran perubahan Indonesia tampil variatif; karena setiap ormas memilih dan memiliki aksentuasi yang berbeda.

Berbeda dengan ormas-ormas lain, yang berdiri pada awal abad 20, menurut Federspiel, Persis mempunyai ciri khas tersendiri: kegiatannya dititikberatkan pada pembentukan paham keagamaan. Adapun kelompok-kelompok pergerakan yang telah diorganisasikan sebelumnya, seperti Boedi Oetomo (1908) hanya bergerak dalam bidang pendidikan bagi penduduk pribumi (khususnya orang Jawa dan Madura); Syarekat Islam (1912) bergerak dalam bidang perdagangan dan politik; dan Muhammadiyah (1912) gerakannya diperuntukkan bagi kesejahteraan sosial masyarakat muslim dan kegiatan pendidikan keagamaan.⁶

Pada mulanya, gerakan pembaharu yang dilakukan oleh kelompok “Muslim Modernis” di Indonesia timbul akibat pengaruh gerakan kebangkitan Islam Ibn Taimiyyah (1263-1328) yang menyebutkan gerakannya dengan nama “*Muhyi at-Tsaris salaf*”, membangkitkan kembali ajaran lama. Yang dimaksud ajaran lama di sini adalah ajaran para sahabat rasul dan tabi’in; serta ajaran Ahmad Ibn Hanbal yang senantiasa mempraktikan *ijtihad* dan sangat anti kemusyrikan. Pedoman yang dipakai adalah al-Qur’an dan as-Sunnah. Pendirian

⁵ Martin van Bruinessen, *Kitab Fiqih di Pesantren Indonesia dan Malaysia*, (Pesantren No.1 vol.VI, 1989) 40

⁶ Howard M. Federspiel, *Persatuan Islam; Islamic Reform in Twentieth Century Indonesia*. (New York, Cornel University, 1970) 11.

Ibn Taimiyyah ini disokong penuh muridnya, Ibn Qayyim al-Jauziyah (1292-1350), kemudian disebarluaskan oleh Muhammad Ibn Wahab (1703-1787) dengan gerakan Wahabi-nya di jazirah Arab. Jamaluddin Al-Afghani (1839-1897) kemudian menginstensifikannya dalam perjuangan politik Islam dalam upaya mempersatukan perwujudan gerakan politik Islam dalam upaya mempersatukan umat Islam diseluruh dunia. Gerakan Jamaluddin ini mendapatkan kerangka ideologis dan teologis dari muridnya, Muhammad Abduh (1845-1905) di Mesir. Setelah itu muncullah berbagai gerakan di seluruh pelosok negeri khususnya di Indonesia.⁷

Pemikiran pembaruan keagamaan yang melatarbelakangi pendirian Persis muncul di tengah *setting* sosial keagamaan yang ditandai oleh meluasnya praktik *taqlid* yang dianggap sebagai penyebab kejumudan; praktik *khurafat* yang dipandang merusak aqidah Islam; *bid'ah* dalam pengamalan ibadah; pengaruh kolonialisme terhadap pendidikan dan pembentukan pandangan hidup masyarakat. Kepercayaan kepada *takhayul* dan kemusyrikan yang berkembang luas dikalangan masyarakat Muslim, menjadi bagian dari keprihatinan yang mendorong lahirnya gerakan Persis. Karena itu, sebagai organisasi *tajdid*, pembentukan ormas Persis diarahkan kepada empat hal, yaitu: *ruju' ilaa Qur'an wa sunnah*, revitalisasi intelektualitas keagamaan, tranformasi sosial dan perubahan iklim politik.⁸

Pendidikan Islam yang dikembangkan oleh Persis, sebagai misi dan agenda pembaharuan Islam dan modernisasi kehidupan umat, agak berbeda dengan model pendidikan Islam di ormas lain. Gagasan pendidikan yang diterapkan pada lembaga Persis sangat dipengaruhi oleh model pendidikan modern yang diinspirasi oleh sistem pendidikan di sekolah-sekolah Belanda. Hal itu dikarenakan tokoh yang berpengaruh di Persis yaitu Mohammad Natsir, beliau adalah pelopor pendidikan Persis yang karena keilmuan dan besarnya wawasan beliau, bukan hanya sebagai direktur Pendidik Islam (Pendis) tetapi juga pengajar di sekolah guru *Hollands Inlandsche Kweekschool* (HIK) dan MULO.⁹

⁷ Lothrop Stoddard, *Dunia Baru Islam*. (Jakarta: Panitia Penerbit, 1966) 297-298.

⁸ Dadan Wildan, *yang Da'I yang Politikus; Hayat dan Perjuangan Lima Tokoh PERSIS*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1999), 10-16.

⁹ Dadan Wildan, *Sejarah Perjuangan Persis 1923-1983*. (Bandung: Gema Syahida. 1995). 35-36.

Pendidikan Islam di sekolah-sekolah Persis mempunyai beberapa fungsi, yaitu fungsi penanaman nilai keislaman sebagai pedoman hidup; fungsi pengajaran dengan maksud untuk mengajarkan pengetahuan agama Islam; fungsi pengembangan yang dimaksudkan untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT; fungsi perbaikan untuk memperbaiki kesalahan, kelemahan, dan kekurangan dalam pengamalan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari berkaitan dengan TBC (*Tahayul, Bid'ah dan Churafat*); *kaffah* mengamalkan syari'at islam, terwujudnya *taifah mutafaqqihna fiddin* dalam arti terwujudnya kepribadian muslim yang *tafaqquh fi al-din*; menjadi insan *Ulul Albab*; serta membangun kompetensi dasar baik aspek kognitif, afektif, maupun psikomotor peserta didik.¹⁰

Pada dasarnya, perhatian Persis ditujukan terutama pada pembumian paham al-Qur'an dan Sunnah. Hal ini dilakukan dengan berbagai aktivitas, diantaranya dengan mengadakan pertemuan-pertemuan umum, *tablig, khotbah*, kelompok studi, tadarus, penerbitan majalah-majalah dan pendirian sekolah-sekolah (pesantren).¹¹ Dalam bidang pendidikan, misalnya pada tahun 1924 diselenggarakan kelas pendidikan aqidah dan ibadah bagi orang dewasa. Pada tahun 1927 didirikan lembaga pendidikan kanak-kanak dan *Holland Inlandesch School* (HIS) yang merupakan proyek lembaga pendidikan Islam (Pendis) di bawah Mohammad Natsir. Dan pada tanggal 4 Maret 1936, secara resmi didirikan Pesantren Persatuan Islam yang pertama dan diberi nomor 1 (satu) di Bandung.¹²

Penomoran lembaga pendidikan dasar dan menengah di Persis menurut Dr. KH. Dedeng Rosyidin, bukan berasal dari ide dan gagasan spontan semata, namun hal tersebut mempunyai landasan yang terilhami dalam penomoran ayat dalam al Qur'an yang dilakukan oleh kerajaan Ottoman di Turki pada tahun 1598 dengan nama *the ayet ber kenar system*. Walaupun pada 1598 dimulainya penomoran ayat suci al Qur'an namun tidak semua *mushaf* kala ini mempunyai nomor karena masih manual ditulis tangan. Namun, pada tahun 1881 kerajaan

¹⁰ Dedeng Rosyidin, *Konsep Pendidikan Formal Islam*. Pustaka Nadwah, Bandung, 2009, 264-290

¹¹ Adilan, D. I. *Persatuan Islam dan Sosio Kultural Masyarakat Lampung Utara*. (Al-Adyan: Journal of Religious Studies, 1(2), 2020). 79-87.

¹² Dedeng Rosyidin, *Konsep Pendidikan....* 10

Ottoman membuat cetakan masal dengan versi Al Qur'an yang mempunyai penomoran Ayat. *Mushaf* tersebut dari 1 halaman terdapat 15 baris, serta 1 juz rata – rata 20 halaman. Penomoran ayat dalam al Qur'an ini mempunyai tujuan untuk mempermudah para pelajar dalam menghafal Al Qur'an.¹³ Oleh karena itu, pengurus pesantren Persis kala itu memberikan penomoran dalam lembaga pendidikannya untuk memudahkan diingat. Selain terinspirasi dari sejarah penomoran ayat al Qur'an, begitu juga dalil al Qur'an surat *as –Shaff* ayat 4 tentang ketersusunan, barisan dalam berjuang dalam sebuah kegiatan besar baik itu jihad maupun dalam tafsiran umumnya yaitu pendidikan, itu Allah Swt lebih dicintai, berikut kutipan ayat tersebut:

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَانَهُم بُنْيَانٌ مَّرْصُوصٌ

Artinya: Sesungguhnya Allah menyukai orang yang berperang dijalan-Nya dalam barisan yang teratur seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh.

Lembaga pendidikan Persis, sebagai entitas unik dengan karakteristik sendiri, menghadapi tantangan dalam mengelola data, identifikasi, dan administrasi. Salah satu elemen yang dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap efektivitas lembaga adalah sistem penomoran yang digunakan. Sistem penomoran dalam lembaga pendidikan Persis menjadi elemen kunci dalam manajemen, identifikasi, dan administrasi. Penerapan sistem penomoran yang terstruktur dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap efektivitas pengelolaan dan administrasi lembaga pendidikan Persis. Dengan adanya identifikasi yang jelas, dapat dikelola secara lebih efisien, mengurangi risiko kebingungan dan kesalahan administratif.¹⁴

Saat kita bicara tentang sistem penomoran di lembaga pendidikan Persis, kita melihat sebuah perjalanan evolusi. Pengenalan inovasi baru menjadi penting untuk menjawab tantangan dan memastikan sistem ini dapat memberikan dukungan optimal sesuai kebutuhan lembaga. Penerapan sistem penomoran yang

¹³ Ali Akbar. *The Influence of Ottoman Qur'ans in Southeast Asia Through the Ages*. (Oxford University Press, 2015). 316

¹⁴ Husen, A. R., & Meirawan, D. *Transformation of Pesantren Persatuan Islam*. (2021) 34

efektif bukan hanya sekadar menawarkan kemudahan dalam pengelolaan dan administrasi lembaga pendidikan Persis, melainkan juga meningkatkan kapabilitas dalam melakukan monitoring dan evaluasi secara sistematis.¹⁵ Kepraktisan sistem penomoran menjadi fokus selanjutnya, mengevaluasi sejauh mana sistem dapat diimplementasikan dan digunakan dengan mudah oleh semua pemangku kepentingan. Pertimbangan melibatkan ketersediaan sumber daya, kecepatan akses, dan integritas data.¹⁶

Pesantren Persatuan Islam (Persis) memiliki peran penting dalam pengembangan pendidikan Islam di Indonesia. Salah satu aspek penting yang perlu diteliti adalah kontribusi sistem penomoran dalam pengelolaan lembaga pendidikan dan pengembangan pendidikan Islam di pesantren, khususnya dalam konteks Strategi manajemen organisasi lembaga pendidikan pimpinan pusat Persatuan Islam (PP Persis).¹⁷

Kontribusi sistem penomoran dalam pengelolaan lembaga pendidikan dan pengembangan pendidikan Islam di pesantren, khususnya dalam konteks Strategi manajemen organisasi lembaga pendidikan pimpinan pusat Persatuan Islam (PP Persis) dapat menjadi topik penelitian yang menarik. Sistem penomoran dapat berperan dalam identifikasi, pelacakan, dan pengelolaan data entitas pendidikan, serta pengorganisasian administratif. Dalam konteks Pesantren Persatuan Islam (Persis), penelitian ini dapat menyoroti bagaimana sistem penomoran mendukung efisiensi pengelolaan lembaga pendidikan, termasuk dalam hal pengelolaan data santri, administrasi, dan monitoring perkembangan pendidikan. Selain itu, kajian terkait juga dapat meliputi implementasi teknologi informasi dalam sistem penomoran, integrasi sistem penomoran dengan manajemen pendidikan, dan dampaknya terhadap pengembangan pendidikan Islam di pesantren.

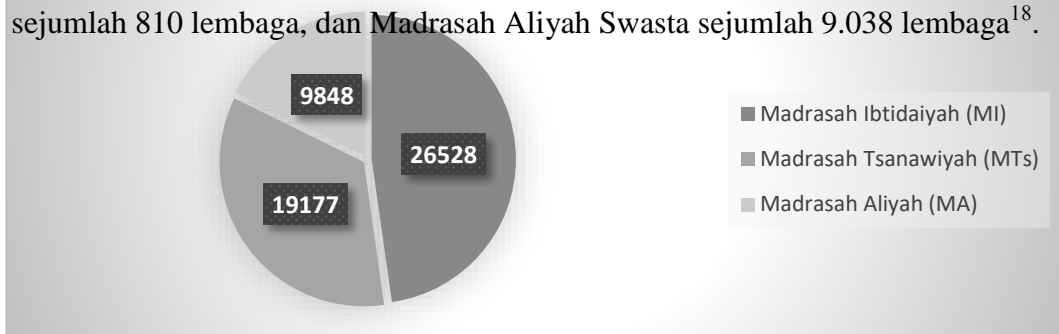
Menurut situs Emis Kemenag, hingga Semester Genap Tahun pelajaran 2022/2023, jumlah madrasah di Indonesia berdasarkan status negeri dan swasta

¹⁵ Rusmana, Dadan., & Hamdani Akbar, Fajar. *Dari Literasi Hingga Ideologi: Kajian Tafsir Al-Quran Para Aktivis Ormas Persatuan Islam*. 6(2). (Al-Bayan: Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, 2021). 76

¹⁶ Irawan, Dede. *Studi Etnografi Komunikasi pada Organisasi Persatuan Islam*. (Communicatus: Jurnal Ilmu Komunikasi, 2(1), 2019). 55–70.

¹⁷ Risdiana, Aris. *Strategi Dakwah Persatuan Islam (Persis) Riau* (Vol. 1, Issue 2). (Yogyakarta: Studi Dakwah dan Komunikasi, 2019).

untuk setiap jenjangnya adalah sebagai berikut: Madrasah Ibtidaiyah (MI) Negeri sejumlah 1.711 lembaga, Madrasah Ibtidaiyah Swasta sejumlah 24.817 lembaga, Madrasah Tsanawiyah (MTs) Negeri sejumlah 1.525 lembaga, Madrasah Tsanawiyah Swasta sejumlah 17.652 lembaga, Madrasah Aliyah (MA) Negeri sejumlah 810 lembaga, dan Madrasah Aliyah Swasta sejumlah 9.038 lembaga¹⁸.



Gambar 1.1 Jumlah Madrasah Perjenjang tahun 2023

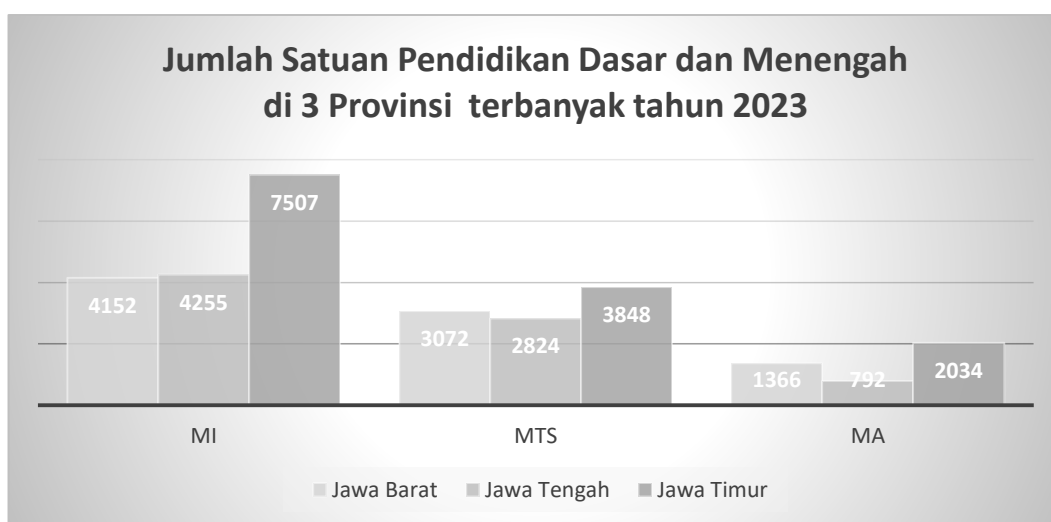
Data mengenai jumlah madrasah di Indonesia menunjukkan bahwa Provinsi Jawa Timur memiliki jumlah madrasah terbanyak di beberapa jenjang pendidikan. Madrasah Ibtidaiyah (MI) di Jawa Timur memiliki jumlah terbanyak, yaitu 7507, dengan 146 MI negeri dan 7361 MI swasta. Di urutan kedua terdapat Jawa Tengah dengan jumlah 4255 MI, terdiri dari 114 MI negeri dan 4141 MI swasta¹⁹. Sementara itu, Jawa Barat menempati urutan ketiga dengan jumlah 4152 MI, terdiri dari 91 MI negeri dan 4061 MI swasta. Untuk Madrasah Tsanawiyah (MTs), Jawa Timur juga menduduki peringkat pertama dengan jumlah 3848, terdiri dari 198 MTs negeri dan 3650 MTs swasta. Di urutan kedua terdapat Jawa Barat dengan jumlah 3072 MTs, terdiri dari 161 MTs negeri dan 2911 MTs swasta, sementara Jawa Tengah berada di urutan ketiga dengan jumlah 2824 MTs, terdiri dari 129 MTs negeri dan 1695 MTs swasta²⁰. Sementara itu, untuk Madrasah Aliyah (MA), Jawa Timur juga menempati peringkat pertama dengan

¹⁸Ayo Madrasah. *Jumlah Madrasah di Indonesia* <https://www.ayomadrasah.id/2016/07/jumlah-ra-madrasah-di-indonesia.html/> diakses 26 Desember 2023

¹⁹ Kementerian Agama. *Satu Data* <https://satudata.kemenag.go.id/statistik/> diakses 20 Januari 2024

²⁰ Direktorat Jendral Pendidikan Islam Kementerian Agama, *Madrasah Kemenag atau kemdikbud*. <https://pendis.kemenag.go.id/read/madrasah-kemenag-atau-kemdikbud/>

jumlah 2034, terdiri dari 91 MA negeri dan 1943 MA swasta. Di urutan kedua terdapat Jawa Barat dengan jumlah 1366 MA, terdiri dari 77 MA negeri dan 1289 MA swasta, dan Jawa Tengah berada di urutan ketiga dengan jumlah 792 MA, terdiri dari 65 MA negeri dan 727 MA swasta.



Gambar 1.2 Jumlah Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah di 3 Provinsi

Jumlah lembaga pendidikan yang begitu banyak, baik negeri maupun swasta, menjadikan penting adanya sistem penomoran yang baku dan konsisten. Oleh karena itu, pemerintah telah mengeluarkan Permendikbud No. 99 Tahun 2013 tentang Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Kemendikbud²¹, Inmen Kemdikbud No. 2 Tahun 2011 tentang Kegiatan Pengelolaan Data Pendidikan Menteri Pendidikan Nasional²², Surat Keputusan Kabalitbang Diknas Nomor 3574/G.G4/KL/2009 tanggal 22 Oktober 2009 tentang Nomor Pokok Sekolah Nasional Sebagai Nomor Unik Satuan Pendidikan. Ketiga regulasi tersebut mengatur tentang sistem penomoran satuan pendidikan, yang disebut dengan Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN)²³.

NPSN merupakan kode pengenalan identitas sekolah yang bersifat unik, tetap, dan berlaku selama satuan pendidikan yang bersangkutan masih berdiri. Kode NSPN menggunakan delapan digit, dan berlaku untuk semua sekolah di Indonesia maupun di luar negeri yang berafiliasi ke Indonesia. Format baku

²¹ Permendikbud No. 99 Tahun 2013

²² Inmen Kemdikbud No. 2 Tahun 2011

²³ Surat Keputusan Kabalitbang Diknas Nomor 3574/G.G4/KL/2009 tanggal 22 Oktober 2009

adalah XYYZZZZZ, dengan X adalah Kode Wilayah, YY adalah Nomor Kelompok, dan ZZZZZZ adalah nomor serial yang khas untuk tiap sekolah. NPSN diberikan kepada seluruh satuan pendidikan di Indonesia, baik negeri maupun swasta. Pemberian NPSN dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan²⁴. Dengan adanya NPSN, diharapkan dapat memudahkan pengelolaan dan pendataan satuan pendidikan di Indonesia. Selain itu, NPSN juga dapat digunakan untuk berbagai keperluan, seperti pendataan peserta didik, akreditasi, dan pendanaan pendidikan.

Terdapat perbedaan yang signifikan dalam penomoran lembaga pendidikan di Persatuan Islam (Persis) jika dibandingkan dengan sistem yang diterapkan oleh pemerintah. Penelitian pendahuluan yang dilakukan oleh penulis menunjukkan adanya ketidak konsistenan dalam pemberian identitas bagi lembaga pendidikan di Persis. Beberapa kasus menunjukkan variasi dalam penomoran, yang dapat dilihat dari sejumlah lembaga pendidikan di Persis yang memberikan identitas mereka dengan cara yang berbeda. Misalnya, sebagian besar lembaga pendidikan setelah diberi nomor, mayoritas di antaranya mencantumkan nama daerah asal lembaga tersebut, sementara beberapa lainnya memilih untuk mencantumkan kata sifat dalam penamaannya, terutama dalam dekade terakhir ini.

Tidak hanya itu, penelitian juga mengungkap adanya lembaga pendidikan di Persis yang memiliki dua nomor identitas. Contohnya, Pesantren Persis Pajagalan di Bandung dan Pesantren Persis Bangil di Jawa Timur, keduanya memiliki dua nomor yang berbeda. Fenomena ini menunjukkan bahwa sistem penomoran di Persis tidaklah seragam dan mengindikasikan adanya variasi dalam praktik penamaan lembaga pendidikan di dalam organisasi tersebut.

Lebih jauh lagi, pengamatan penulis menemukan bahwa penomoran di Persis tidak membedakan antara lembaga pendidikan dasar dan menengah. Dalam prakteknya, satu nomor identitas digunakan untuk Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), dan Madrasah Aliyah (MA). Hal ini berbeda dengan sistem yang diterapkan oleh pemerintah yang menetapkan penomoran

²⁴ Surat Keputusan Kabalitbang Diknas Nomor 3574/G.G4/KL/2009 Tentang Nomor Pokok Sekolah Nasional sebagai Nomor Unik Satuan Pendidikan

yang unik untuk setiap jenis lembaga pendidikan, mempermudah identifikasi dan klasifikasi jenis lembaga tersebut. Walaupun begitu, perlu dicatat bahwa nomor identitas pesantren di Persis tidak pernah ganda antar desa, kota, maupun provinsi. Penggunaan ganda di sini hanya berlaku untuk satuan pendidikan saja.

Namun, terdapat perbedaan signifikan dalam penomoran lembaga pendidikan di Persis dibandingkan dengan sistem yang diterapkan oleh pemerintah. Penelitian pendahuluan menunjukkan adanya ketidakkonsistenan dalam pemberian identitas bagi lembaga pendidikan di Persis, yang tercermin dari variasi dalam penomoran dan praktik penamaan lembaga. Ketidakteraturan ini tidak hanya menciptakan kebingungan di kalangan pengelola lembaga pendidikan, tetapi juga dapat menghambat akses informasi bagi orang tua dan siswa yang mencari lembaga pendidikan yang sesuai. Fenomena ini menunjukkan bahwa sistem penomoran di Persis tidak seragam dan dapat menimbulkan tantangan dalam identifikasi dan klasifikasi lembaga pendidikan. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk menetapkan standar penomoran yang lebih konsisten dan terstruktur agar memudahkan administrasi dan pengelolaan lembaga pendidikan di Persatuan Islam.

Dalam konteks ini, penting untuk mempertimbangkan strategi manajemen yang tepat dalam merumuskan sistem penomoran yang efektif. Strategi manajemen yang efektif melibatkan tiga tahap utama: perumusan, implementasi, dan evaluasi. Pada tahap perumusan, penting untuk melakukan analisis mendalam terhadap kebutuhan dan tantangan yang dihadapi oleh lembaga pendidikan di Persis. Hal ini dapat dilakukan melalui survei dan wawancara dengan para pemangku kepentingan, termasuk guru, siswa, dan orang tua. Dengan memahami konteks dan kebutuhan spesifik, lembaga pendidikan dapat merumuskan sistem penomoran yang tidak hanya konsisten, tetapi juga relevan dengan kondisi lokal. Selain itu, referensi dari penelitian sebelumnya dapat memberikan panduan dalam merancang sistem yang lebih baik. Darnall dan Bryant menekankan pentingnya

memahami konteks lokal dalam pengembangan strategi yang berkelanjutan, yang juga dapat diterapkan dalam pengelolaan lembaga pendidikan.²⁵

Setelah strategi penomoran dirumuskan, langkah selanjutnya adalah implementasi sistem penomoran yang telah disepakati. Implementasi ini harus dilakukan secara bertahap dan melibatkan pelatihan bagi pengelola lembaga pendidikan agar mereka memahami pentingnya sistem penomoran yang baru. Selain itu, sosialisasi kepada masyarakat juga perlu dilakukan agar orang tua dan siswa dapat beradaptasi dengan perubahan ini. Proses implementasi yang baik akan memastikan bahwa setiap lembaga pendidikan mendapatkan identitas yang jelas dan mudah diakses, sehingga mempermudah proses administrasi dan pengelolaan. Dalam hal ini, dukungan dari pemerintah dan organisasi pendidikan lainnya sangat diperlukan untuk memastikan kelancaran implementasi.

Setelah sistem penomoran diterapkan, evaluasi menjadi tahap krusial untuk menilai efektivitas sistem yang baru. Evaluasi ini harus dilakukan secara berkala untuk mengidentifikasi apakah sistem penomoran yang telah diterapkan mampu memenuhi tujuan yang diharapkan. Pengumpulan umpan balik dari pengelola lembaga pendidikan dan masyarakat akan memberikan wawasan yang berharga mengenai kelebihan dan kekurangan sistem yang baru. Dengan demikian, evaluasi tidak hanya berfungsi untuk menilai keberhasilan, tetapi juga untuk melakukan penyesuaian yang diperlukan agar sistem penomoran tetap relevan dan efektif dalam mendukung pengelolaan lembaga pendidikan.²⁶

Dengan demikian, penelitian tentang strategi manajemen pengelolaan lembaga pendidikan, khususnya mengenai sistem penomoran pendidikan dasar dan menengah di Persatuan Islam, akan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pengembangan pendidikan Islam di Indonesia. Upaya untuk merumuskan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi sistem penomoran yang efektif akan menjadi langkah penting dalam meningkatkan kualitas pengelolaan lembaga pendidikan dan mendukung visi pendidikan yang lebih baik di masa

²⁵ Darnall, N., & Bryant, R. B. *Corporate sustainability in the supply chain: pressures, practices, and performance*. (Strategic Management Journal, 27(8) 2006). 68

²⁶ David, F. R., & David, F. *Strategic Management Concepts And Cases* (16th ed.). (Pearson Education Limited. 2018). 79

depan. Pendekatan yang terstruktur dan sistematis dalam pengelolaan lembaga pendidikan ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih baik, transparan, dan akuntabel, sehingga mendukung pencapaian tujuan pendidikan yang lebih luas di Indonesia.

Studi pendahuluan ini menggambarkan bahwa sistem penomoran lembaga pendidikan di Persis tidak seragam dan cenderung bervariasi. Hal ini menimbulkan tantangan tersendiri dalam mengidentifikasi dan mengklasifikasikan lembaga pendidikan di dalam organisasi Persis. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk menetapkan standar penomoran yang lebih konsisten dan terstruktur agar memudahkan dalam administrasi dan pengelolaan lembaga pendidikan di Persatuan Islam. Berdasarkan hasil studi pendahuluan tersebut, penulis merasa tertarik meneliti lebih jauh studi tentang strategi manajemen pengelolaan lembaga pendidikan khususnya tentang sistem penomoran pendidikan dasar dan menengah Persatuan Islam (Persis).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perumusan strategi manajemen organisasi dalam penomoran lembaga pendidikan dasar dan menengah Persatuan Islam?
2. Bagaimana implementasi strategi manajemen organisasi dalam penomoran lembaga pendidikan dasar dan menengah Persatuan Islam?
3. Bagaimana evaluasi strategi manajemen organisasi dalam penomoran lembaga pendidikan dasar dan menengah Persatuan Islam?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa temuan-temuan penelitian yang berkaitan dengan hal-hal berikut ini:

1. Menganalisis perumusan strategi manajemen organisasi dalam penomoran lembaga pendidikan dasar dan menengah Persatuan Islam.
2. Menganalisis implementasi strategi manajemen organisasi dalam penomoran lembaga pendidikan dasar dan menengah Persatuan Islam.

3. Menganalisis evaluasi strategi manajemen organisasi dalam penomoran lembaga pendidikan dasar dan menengah Persatuan Islam.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang signifikan dalam pengembangan pendidikan Islam di lembaga pendidikan Pimpinan Pusat Persatuan Islam (PP Persis), khususnya dalam hal pengelolaan arsip dan manajemen organisasi. Adapun secara praktis manfaat penelitian sebagai berikut:

1. Bagi peneliti: Penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana sistem penomoran dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan arsip di lembaga pendidikan Pimpinan Pusat Persatuan Islam (PP Persis). Hal ini dapat membantu dalam mengoptimalkan pengelolaan arsip dan meminimalkan kesalahan dalam penempatan dan pencarian dokumen.
2. Bagi keilmuan: Penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih luas tentang kontribusi sistem penomoran terhadap efisiensi dan efektivitas manajemen organisasi lembaga pendidikan Pimpinan Pusat Persatuan Islam (PP Persis). Hal ini dapat membantu dalam mengembangkan strategi manajemen yang lebih baik dan efektif.
3. Bagi lembaga pendidikan Persis: Penelitian ini dapat memberikan rekomendasi untuk peningkatan sistem penomoran di lembaga pendidikan Pimpinan Pusat Persatuan Islam (PP Persis), seperti pengembangan kurikulum pendidikan Islam yang lebih integral dan pengembangan program pengelolaan arsip yang lebih efektif.
4. Bagi Masyarakat: Penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran stakeholder terkait (misalnya, staf administrasi, pengajar, dan siswa) terhadap pentingnya sistem penomoran dalam pengelolaan arsip dan informasi di lembaga pendidikan Pimpinan Pusat Persatuan Islam (PP Persis).

E. Kerangka Berpikir

Sistem penomoran adalah suatu sistem yang digunakan untuk memberikan nomor atau kode kepada suatu objek atau kegiatan. Awal mula system penomoran yang fenomenal adalah system penomoran Romawi. Namun, system tersebut dinilai tidak efektif karena tidak mempunyai angka nol. Maka selanjutnya

penomoran beralih kepada angka Arab yang di kenalkan oleh Al-Khawarizmi, seorang ilmuwan Muslim terkenal. Beliau memperkenalkan angka nol melalui karyanya yang monumental, *Al-Jabr wa al-Muqabala*, sekarang dikenal dengan nama Aljabar. Angka nol ini lalu dibawa ke Eropa oleh Leonardo Fibonacci dalam karyanya, *Liber Abaci*. Semakin dikenal luas di zaman *Renaissance* dengan tokoh-tokonya, Leonardo da Vinci dan Rene Descartes.²⁷ Sistem penomoran dapat digunakan untuk berbagai keperluan, termasuk untuk keperluan administrasi, identifikasi, dan monitoring.²⁸ Pada konteks pendidikan, sistem penomoran dapat digunakan untuk memberikan nomor atau kode kepada lembaga pendidikan, kelas, mata pelajaran, dan siswa. Sistem penomoran yang baik dapat membantu dalam pengelolaan dan administrasi pendidikan, serta memudahkan dalam mengidentifikasi dan membedakan lembaga pendidikan, kelas, mata pelajaran, dan siswa.²⁹

Seiring dengan upaya peningkatan kualitas pendidikan di lingkungan Persis, implementasi sistem penomoran pada tingkat pendidikan dasar dan menengah menjadi suatu aspek krusial dalam manajemen organisasi lembaga pendidikan Persis. Sistem penomoran yang terstruktur dengan baik tidak hanya berperan dalam efisiensi administratif, tetapi juga memberikan kontribusi penting dalam pemantauan dan evaluasi keseluruhan kinerja lembaga pendidikan.³⁰ Pentingnya sistem penomoran ini tercermin dalam kemudahan identifikasi dan perbedaan antar lembaga pendidikan Persis. Melalui pemberian nomor yang unik dan terstruktur, setiap lembaga pendidikan dapat dengan mudah diidentifikasi, menghindari potensi kebingungan atau kesalahan dalam administrasi. Selain itu, sistem penomoran yang baik juga mendukung pencatatan data secara rinci, seperti profil sekolah, prestasi akademis, dan fasilitas yang dimiliki.³¹

²⁷ <https://www.ruangguru.com/blog/tahukah-kamu-awal-sejarah-angka> diakses 29 Desember 2023

²⁸ Betz, Frederick. *Managing science; methodology and organization of research*. (Springer. 2011).

²⁹ Thrupp, M., & Archer, R. *Education management in managerialist times: beyond the textual apologists*. (Open University Press. 2003). 89

³⁰ Jamaluddin, Dindin., Ramdhani, M. A., Priatna, Tedi., & Darmalaksana, Wahyu. *Techno university to increase the quality of Islamic higher education in Indonesia*. (International Journal of Civil Engineering and Technology, 10(01), 2019). 1264–1273.

³¹ Churchman, C. West. *Management science: science of managing and managing of science*. (Interfaces, 24(4), 1994). 99–110.

Manajemen organisasi adalah suatu proses yang digunakan untuk merencanakan, mengorganisasikan, memimpin, dan mengendalikan sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan organisasi.³² Manajemen organisasi merupakan salah satu aspek penting dalam pengelolaan lembaga pendidikan. Dalam konteks lembaga pendidikan, manajemen organisasi mencakup berbagai aspek, termasuk perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian.³³ Perencanaan pendidikan merupakan proses penyusunan program pendidikan yang akan dilaksanakan. Pengorganisasian pendidikan merupakan proses pengaturan sumber daya pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan. Kepemimpinan pendidikan merupakan proses mempengaruhi orang lain untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan pendidikan. Pengendalian pendidikan merupakan proses monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pendidikan.³⁴

Kontribusi utama sistem penomoran terletak pada kemampuannya untuk memberikan fondasi yang kokoh dalam pengelolaan dan administrasi pendidikan. Dengan menerapkan sistem penomoran yang baik, lembaga pendidikan Islam dapat meningkatkan efektivitas operasional mereka, merampingkan proses administratif, dan mengoptimalkan alokasi sumber daya. Sistem penomoran yang terstruktur dengan baik tidak hanya mendukung pengelolaan lembaga secara umum, tetapi juga memudahkan dalam mengidentifikasi dan membedakan lembaga pendidikan, kelas, mata pelajaran, dan siswa. Nomor unik yang diberikan kepada setiap entitas dalam lingkungan pendidikan memberikan landasan yang jelas dalam menetapkan identitas dan peran masing-masing.³⁵ Sebagai contoh, nomor identifikasi untuk kelas atau mata pelajaran dapat membantu dalam penyusunan jadwal pelajaran yang efisien dan pemantauan terhadap perkembangan akademis masing-masing siswa.

³² Aristianingsih, R., Irawan, I., & Sulhan, M. *Kompetensi manajerial kepala madrasah dalam kinerja tenaga kependidikan di madrasah*. (Jurnal Isema: Islamic Educational Management, 7(1), 2022). 43–52.

³³ Irawan, I. *Paradigma Keilmuan Manajemen Pendidikan Islam*. MANAGERIA: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam, 1(2). (2016).

³⁴ Wahyuni, A., Hijaz, M. I. A., & Irawan, I. *Tata Kelola Pembiayaan Pendidikan di Pesantren Modern*. (Journal Evaluasi, 5(1), 2021) 19

³⁵ Irawan, I., Abdurohim, N., Gustini, N., & Iwan Ridwanullah, A. *Soft Skill Keprofesian Manajemen Pendidikan Islam Di Era Milenial*. (Conference or Workshop Item. 2020).

Selain itu, kontribusi sistem penomoran juga tercermin dalam kemudahan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pendidikan. Nomor identifikasi yang terkait dengan setiap entitas memungkinkan lembaga pendidikan Islam untuk dengan cepat melacak dan mengevaluasi progres pendidikan, mengidentifikasi potensi masalah, dan merespons perubahan dengan lebih efisien. Monitoring yang intensif dapat membantu lembaga pendidikan dalam menilai keberhasilan implementasi program pendidikan, memperbaiki strategi yang kurang efektif, dan memberikan pelayanan pendidikan yang lebih baik kepada siswa.³⁶ Dengan demikian, sistem penomoran yang diterapkan secara baik di lembaga pendidikan Islam dapat dianggap sebagai pondasi penting dalam pengembangan pendidikan. Melalui kontribusinya dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan, memudahkan identifikasi dan perbedaan, serta memfasilitasi monitoring dan evaluasi, sistem penomoran menjadi alat yang tak tergantikan dalam mendukung perkembangan pendidikan Islam yang holistik dan berkualitas.³⁷

Penelitian ini akan fokus pada penerapan teori strategi manajemen organisasi dalam penomoran lembaga pendidikan Persatuan Islam. Teori strategi manajemen organisasi terdiri dari tiga tahap: perumusan strategi, implementasi strategi, dan evaluasi strategi. Tahap perumusan strategi meliputi penetapan visi, misi, dan tujuan organisasi.³⁸ Tahap implementasi strategi meliputi penyusunan program kerja, alokasi sumber daya, dan pembangunan budaya organisasi. Tahap evaluasi strategi meliputi monitoring dan penyesuaian strategi.

Penelitian ini akan menganalisis strategi penomoran yang ada saat ini dan merumuskan strategi baru yang lebih efektif dan efisien. Strategi baru ini kemudian akan diimplementasikan dan dievaluasi secara berkala. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu lembaga pendidikan Persatuan Islam dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi penomoran lembaga pendidikan dasar dan

³⁶ Irawan, I., & Mahmud, M. *Strategic Management System As The Internationalization Policy Of Indonesian Islamic Higher Education*. Atlantis Press. (2017).

³⁷ Irawan. *Filsafat Manajemen Pendidikan Islam* (K. khoerudin & E. Kuswandi, Eds.; 1st ed., Vol. 1). (Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2019).

³⁸ Hunger, J. David dan Thomas L. Wheelen. *Strategic Management*. (California: Addison Wesley Publishing Company. 2014) 15

menengah. Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti memfokuskan pada penelitian evaluasi pendidikan menurut Stufflebeam yaitu konteks, input, proses, dan produk (CIPP)³⁹ seperti ditunjukkan dalam gambar 3 proses penelitian dengan skema Stufflebeam dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1.3. Kerangka Berpikir Model CIPP

F. Hasil Penelitian Terdahulu

Untuk menunjang aspek-aspek yang berhubungan dengan penelitian ini, perlunya disampaikan beberapa hasil penelitian terdahulu yang relevan dan dapat dijadikan rujukan, yaitu;

- a. Disertasi yang berjudul “*The Persatuan Islam*” (*Islamic Union*) yang ditulis oleh Howard M. Federspiel pada program doktoral *Institute of Islamic Studies*

³⁹ Stufflebeam, Daniel L., Guili Zhang. *The Cipp Evaluation Model: How to evaluate for improvement and accountability* (Cetakan ke- 1). (New York: The Guilford Press, 2017).

di McGill University. Penelitian itu telah mengkaji secara komprehensif tentang Persatuan Islam pada tahun 1966 mulai dari system kepercayaan, Gerakan dakwah, politik, ekonomi serta pendidikan yang berhubungan data dalam penelitian yang penulis lakukan.⁴⁰ Penelitian ini tidak hanya menjelaskan sistem kepercayaan yang dianut oleh organisasi Persis, tetapi juga mengeksplorasi gerakan dakwah, politik, ekonomi, serta pendidikan yang menjadi bagian integral dari eksistensi dan perkembangan Persatuan Islam. Dengan menggunakan pendekatan multidisipliner, Federspiel berhasil menyajikan gambaran yang utuh mengenai dinamika internal dan eksternal yang mempengaruhi organisasi ini, serta bagaimana pengaruhnya terhadap masyarakat yang lebih luas.

- b. Disertasi yang berjudul “Konsep Pendidikan Formal Persatuan Islam (PERSIS)” yang ditulis oleh Dedeng Rosyidin pada program studi Pendidikan Islam S3 pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Penelitian itu telah mengkaji secara komprehensif konsep pendidikan formal PERSIS dari masa ke masa dan dari jenjang pendidikan diniyah sampai perguruan tinggi. Penelitian ini mengkaji secara mendalam konsep pendidikan formal PERSIS dari masa ke masa, mencakup jenjang pendidikan diniyah hingga perguruan tinggi. Rosyidin mengungkapkan bahwa pendidikan bukan hanya sebagai alat transfer ilmu, tetapi juga sebagai sarana untuk membentuk karakter dan nilai-nilai keislaman yang kuat. Dengan begitu, penelitian ini menunjukkan bahwa pendidikan formal di lingkungan PERSIS memiliki peranan strategis dalam membangun generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki komitmen yang tinggi terhadap nilai-nilai keislaman.
- c. Tesis yang berjudul “Manajemen Strategik Peningkatan Mutu Pendidikan di SD Al Irsyad Al Islamiyyah 01 Purwokerto” yang ditulis oleh Agus Tardian pada program studi Manajemen Pendidikan Islam di IAIN Purwokerto. Penelitian ini menyoroti pentingnya manajemen strategik dalam konteks pendidikan. Penelitian ini mendeskripsikan dan menganalisis penerapan

⁴⁰ Federspiel, Howard M. “*The Persatuan Islam (Islamic Union)*”, Ph.D. Dissertaion. (Faculty of Graduate Studies and Research Institute of Islamic Studies McGill University Montreal, 1966) 105

manajemen strategik yang meliputi perencanaan, implementasi, dan evaluasi dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan di SD tersebut. Tardian menegaskan bahwa manajemen yang baik dapat berkontribusi signifikan terhadap peningkatan kualitas pendidikan, yang pada gilirannya akan berdampak positif terhadap prestasi siswa. Dengan pendekatan deskriptif kualitatif, penelitian ini memberikan gambaran yang jelas tentang tantangan dan peluang yang dihadapi dalam menerapkan manajemen strategik di lembaga pendidikan, serta bagaimana hal ini dapat dioptimalkan untuk mencapai tujuan pendidikan yang lebih baik.

- d. Tesis yang berjudul “Strategi Manajemen Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Al-Furqon Palembang” yang ditulis oleh M. Zamziba Syamsudin pada konsentrasi program studi Manajemen Pendidikan Islam di UIN Raden Fatah Palembang. Penelitian ini telah memberikan kontribusi yang berharga dalam memahami manajemen pendidikan di tingkat dasar. Penelitian ini membahas strategi manajemen yang diterapkan oleh SDIT Al-Furqon dalam meningkatkan mutu lembaga pendidikan. Syamsudin menyoroti pentingnya perencanaan yang matang dan pelaksanaan yang konsisten dalam setiap strategi yang diambil. Dengan menganalisis berbagai pendekatan manajerial, penelitian ini menunjukkan bagaimana pengelolaan yang efektif dapat menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, sehingga siswa dapat berkembang dengan optimal. Temuan dari penelitian ini juga dapat menjadi acuan bagi sekolah-sekolah lain dalam menerapkan strategi manajemen yang serupa.
- e. Skripsi yang berjudul “Pesantren Persatuan Islam 1936-1983” yang ditulis oleh Tiar Anwar Bahtiar di Fakultas Sastra Universitas Padjajaran pada tahun 2002. Pada penelitian tersebut mengkaji perspektif historis yang penting mengenai perkembangan pesantren dalam konteks Persatuan Islam. Penelitian ini mengkaji sejarah pesantren PERSIS dari masa pra kemerdekaan, masa penjajahan Jepang, hingga pasca kemerdekaan. Bahtiar menjelaskan bagaimana pesantren berperan sebagai pusat pendidikan dan pengembangan masyarakat, serta tantangan yang dihadapi dalam setiap periode sejarah. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mencerminkan perjalanan

panjang pesantren, tetapi juga menggambarkan bagaimana institusi ini tetap relevan dalam menghadapi perubahan zaman. Keseluruhan penelitian ini memberikan kontribusi yang signifikan dalam memahami peran pendidikan Islam dalam konteks sejarah dan perkembangan masyarakat Indonesia.

No.	Penulis, tahun dan judul	Fokus penelitian	Perbedaan	Persamaan
1	Howard M. Federspiel, (1966) “ <i>The Persatuan Islam</i> ” (<i>Islamic Union</i>)	Sejarah dakwah dan corak gerakan Persis secara umum	Kajian manajemen pendidikan secara khusus	Mengungkap fenomena tentang Persatuan Islam
2	Dedeng Rosyidin, (2009) “Konsep Pendidikan Formal Persatuan Islam (PERSIS)”	Tujuan, kurikulum, pendidik, peserta didik, proses dan evaluasi pendidikan di Persis	Strategi manajemen pendidikan secara khusus	Membahas pendidikan fundamental pendidikan di Persis
3	Agus Tardian, (2020) “Manajemen Strategik Peningkatan Mutu Pendidikan di SD Al Irsyad Al Islamiyyah 01 Purwokerto”	Jaminan dan standar mutu, kultur dan budaya, perubahan organisasi, hubungan lembaga di SD Al Irsyad Al Islamiyyah	Hanya fokus pada satu sekolah dan hasil penelitian mungkin tidak mudah di generalisasikan ke sekolah lain.	Memberikan kontribusi tentang bagaimana meningkatkan mutu pendidikan di sekolah dan lembaga pendidikan Islam.
4	M. Zamziba Syamsudin, (2015) “Strategi Manajemen Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Al-Furqon Palembang”	Pembelajaran, pembiayaan, pemasaran dilingkungan SDIT Al Furqon	Manajemen administrasi lembaga pendidikan dalam penomoran lembaga pendidikan	Analisa strategi manajemen di sekolah Islam

5	Tiar Anwar Bahtiar(2002) “Pesantren Persatuan Islam 1936-1983”	Sejarah pesantren persis pra dan pasca kemerdekaan Indonesia	Pengelolaan penomoran lembaga pendidikan sebagai manifestasi manajemen	Pembahasan pesantren persis yang memiliki ke khasan.
---	---	--	--	--

Tabel 1.1 Hasil Penelitian Terdahulu

G. Definisi Operasional

Dalam penelitian ini, beberapa istilah kunci yang perlu didefinisikan secara operasional adalah sebagai berikut:

- Strategi manajemen: seni dan ilmu merumuskan, melaksanakan, dan mengevaluasi keputusan lintas fungsional yang memungkinkan organisasi untuk mencapai tujuan.
- Manajemen Organisasi: Proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan dalam lembaga pendidikan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
- Sistem Penomoran: Proses pengelolaan dan pengidentifikasian lembaga pendidikan melalui nomor unik yang diberikan kepada setiap lembaga.
- Lembaga Pendidikan Dasar dan Menengah: Institusi yang menyelenggarakan pendidikan formal dari tingkat dasar hingga menengah yang berada di bawah naungan Persatuan Islam.